



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDY
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 536893

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **26.500.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 685 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000
5. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, LAINNYA Rp. 2.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **250.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **450.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **28.015.084.827**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	224.000.000.000
Sub Total	Rp.	279.215.584.827
III. HUTANG	Rp.	112.694.480.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	166.521.104.827

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.